KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : BAKN DPR Usulkan Vaksin Flu Burung Diusut Penegak Hukum
Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2012
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

BAKN DPR Usulkan Vaksin Flu Burung Diusut Penegak Hukum

Jakarta, Pelita

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengusulkan agar hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dalam proyek pengadaan sarana dan prasarana vaksin flu burung tahun anggaran 2010-2011 di Kementerian Kesehatan diteruskan ke penegak hukum.

Permintaan ini disampaikan BAKN DPR setelah menelaah laporan pemeriksaan BPK terhadap proyek tersebut. Dalam penelahaannya, BAKN menduga ada potensi kerugian negara dalam proyek vaksin flu burung itu.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyampaikan hal ini kepada wartawan seusai rapat pimpinan DPR bersama BAKN DPR di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa (14/8).

Pramono mengatakan, dalam rapim itu BAKN menyampaikan hasil telaah laporan BPK yang menunjukkan temuan yang sama dengan penelitian BPK bahwa ada dugaan kerugian negara dalam proyek vaksin flu burung tahun anggaran 2010-2011 sebesar Rp468 miliar.

"Dari telaah BAKN, dalam kasus itu ada potensi kerugian negara yang cukup besar sekitar Rp468 miliar, karena itu BAKN meminta kepada pimpinan untuk diteruskan sesuai dengan mekanisme DPR," kata Pramono.

Atas usulan itu ucap dia, Pimpinan DPR sepakat akan membawa hasil telaahan BAKN ke sidang paripurna terdekat. BAKN akan diberi kesempatan untuk melaporkan sebelum nanti hasilnya disampaikan kepada aparat penegak hukum.

"Mengenai aparat penegak hukumnya itu siapa, nanti paripurna yang memutuskan. Yang pasti permintaan BAKN diteruskan kepada aparat penegak hukum. Kalau diperlukan kepada seluruh instansi. Toh sekarang baik kepolisian dan KPK sedang menangani persoalan flu burung," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Adapun anggota BAKN DPR Achsanul Qosasih mengakui ada potensi korupsi dalam kasus pengadaan vaksin flu burung di Kemenkes tersebut. Menurut Achsanul, kasus vaksin flu burung ini memunculkan nama perusahaan yang juga ada dalam kasus Wisma Atlet, yakni PT Anugrah Nusantara.

"Kita (BAKN) akan lihat sejauh mana kesalahannya. BPK sendiri baru terbitkan hasil pemeriksaannya, biar Kemenkes menjelaskan soal ini. DPR belum bisa menjelaskan apa-apa, termasuk saya," kata Achsanul.

Menurut dia, BAKN bertugas menindaklanjuti pemeriksaan BPK. Hasil kerja alat kelengkapan DPR ini akan dikirim kepada Komisi IX DPR dan XI DPR dan dibahas dalam rapat pimpinan. "Setelah itu konsolidasi, apakah perlu ditindaklanjuti karena bagaimanapun yang bisa menindaklanjuti penegak hukum," kata Achsanul. **(cr-14)**

PERPUSTAKAAN DPR-RI